

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan "Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Bantaran Rel Wonokromo Melalui Pendekatan Pendidikan Oleh Komunitas WEPOSE Surabaya" yang dinilai berdasarkan penerapan pendekatan pemberdayaan yang meliputi Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungkinan dalam strategi pemberdayaan, Komunitas WEPOSE melakukan pemungkinan melalui pendekatan pembinaan terintegrasi dengan mengembangkan program-program seperti Belajar Bareng Kakak Asuh (BBKA) dan Belajar Mandiri Wonokromo (BMW) yang mengintegrasikan pembelajaran dengan aktivitas bermain dan edukasi. Komunitas menciptakan lingkungan kondusif untuk tumbuh kembang anak jalanan dengan membangun sistem mentoring dan pendampingan berkelanjutan. Upaya pemungkinan ini berhasil membangun kesadaran anak-anak jalanan di bantaran rel Wonokromo akan potensi yang mereka miliki, tercermin dari terbentuknya kelompok sosial, antusiasme anak-anak dalam mengikuti program, dan keterlibatan volunteer eksternal yang mendukung proses pemberdayaan.
2. Penguatan dalam strategi pemberdayaan, Komunitas WEPOSE melakukan penguatan melalui program yang terintegrasi mencakup

berbagai aspek pembelajaran penguatan kemampuan dasar seperti calistung (membaca, menulis, dan menghitung) yang menunjukkan kemajuan signifikan dibanding kondisi awal anak-anak yang mengalami buta huruf. Program inovatif "We Got Side" diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak melalui pembelajaran di luar balai seperti berkunjung ke pabrik gery dan pemadam kebakaran. Strategi penguatan ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri anak-anak yang terlihat dari keberanian mereka untuk tampil dan aktif dalam kegiatan. Namun, masih terdapat kendala keterbatasan kolaborasi antar-stakeholder, khususnya antara UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial dengan Komunitas WEPOSE yang belum pernah melakukan kerjasama.

3. Perlindungan dalam strategi pemberdayaan, Komunitas WEPOSE melakukan perlindungan melalui sistem pengawasan ketat dengan rasio 1 kakak pendamping untuk 2-3 anak dalam setiap kegiatan. Program perlindungan bersifat *preventif* dengan memberikan perlakuan setara kepada semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi. Implementasi perlindungan diterapkan melalui penciptaan lingkungan ramah anak dengan pemasangan pamflet larangan merokok, pemberian edukasi pendidikan seksual, dan sistem perlindungan menyeluruh terhadap kasus perundungan. Keunikan program adalah keterlibatan anak-anak sendiri sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Namun, masih terdapat gap koordinasi antara program perlindungan komunitas dengan pemerintah, serta keterbatasan dalam

membangun jaringan dengan lembaga perlindungan anak formal seperti P2TP2A atau UPTD PPA.

4. Penyongkongan dalam strategi pemberdayaan, Komunitas WEPOSE melakukan penyongkongan melalui konsep yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berupa bantuan material (tenaga, waktu, donasi), namun lebih menekankan pada aspek kehadiran dan pembentukan ikatan emosional yang kuat. Konsep "*sustainability community*" menjadi ciri khas yang membedakan WEPOSE dengan komunitas lainnya, dengan visi menciptakan siklus pemberdayaan berkelanjutan dimana anak-anak jalanan yang telah diberdayakan dapat menjadi agen pemberdayaan bagi yang lain. Program operasional meliputi penyediaan buku dan alat tulis, pembelajaran mingguan, fasilitas beasiswa, serta program edukasi dan sosial, yang didukung oleh keterlibatan volunteer dalam memperkuat kapasitas pemberian penyongkongan..
5. Pemeliharaan dalam strategi pemberdayaan, Komunitas WEPOSE melakukan pemeliharaan melalui sistem menyeluruh dengan mengembangkan mekanisme "*we eval*" yang dilakukan secara berkala dengan evaluasi multi-level (setiap kegiatan, 3 bulan, dan 6 bulan). Aspek pemeliharaan mencakup pengembangan materi pembelajaran berkala, struktur organisasi jelas, dan penerapan prinsip keadilan melalui konsep "*equality*" yang memastikan setiap anak mendapat kesempatan sama. Implementasi operasional diperkuat melalui *sense of belonging* pengurus,

perencanaan strategis dengan timeline 6 bulan detail, dan koordinasi terstruktur antara volunteer dan pengurus. Efektivitas pemeliharaan tercermin dari komitmen jangka panjang anak-anak yang konsisten berpartisipasi sejak 2019-2025 dan antusiasme dalam mempromosikan komunitas. Namun, masih ditemukan keterbatasan kolaborasi antar-stakeholder dengan lembaga pemerintah yang mengindikasikan gap komunikasi dan koordinasi yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan dampak program.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan kontribusi berupa rekomendasi. Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Pada fokus pemungkinan, Komunitas WEPOSE perlu mengembangkan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memantau output dan dampak pemberdayaan pada anak jalanan ketika berada di luar pengawasan komunitas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kesadaran akan potensi yang telah dibangun dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, sinergi dengan berbagai stakeholder seperti sekolah formal, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi anak jalanan secara menyeluruh..
2. Pada fokus penguatan, mengingat adanya keterbatasan kolaborasi antar-stakeholder yang ditemukan dalam penelitian, khususnya tidak adanya

kerjasama antara UPTD Kampung Anak Negeri dengan Komunitas WEPOSE, diperlukan upaya sistematis untuk membangun koordinasi dengan lembaga pemerintah. Komunitas WEPOSE perlu mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan usia dan tingkat kemampuan untuk optimalisasi pembelajaran. Kolaborasi dengan universitas perlu diperkuat dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan karakteristik anak pada kelompok usia tertentu (anak kecil, sedang, dan besar). Hal ini akan memastikan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan psikologis anak. Selain itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi output penguatan yang dapat mengukur bagaimana anak-anak mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari di luar pengawasan komunitas.

3. Pada fokus perlindungan, mengingat ditemukannya gap koordinasi antara program perlindungan komunitas dengan pemerintah dan keterbatasan dalam membangun jaringan dengan lembaga perlindungan anak formal, Komunitas WEPOSE perlu memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak formal seperti P2TP2A, UPTD PPA, dan Dinas Sosial. Pembentukan mekanisme rujukan yang jelas dan sistem koordinasi yang terstruktur akan meningkatkan efektivitas perlindungan anak jalanan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring perlindungan yang dapat memantau keamanan dan kesejahteraan anak-anak ketika berada di lingkungan keluarga dan komunitas asalnya,

mengingat potensi risiko yang masih ada di luar pengawasan komunitas.

4. Pada fokus penyongkongan, meskipun konsep *sustainability community* sudah diterapkan, masih ditemukan keterbatasan dalam memberikan penyongkongan jangka panjang pasca program. Komunitas WEPOSE perlu mengembangkan sistem penjemputan untuk anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau mengikuti ujian paket A, B, C bagi yang tidak bersekolah formal. Selain itu, diperlukan program penyongkongan transisi ke dunia kerja dengan membangun jaringan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga pelatihan kerja untuk mencegah anak-anak kembali ke jalanan setelah dewasa. Konsep alumni dan mentorship perlu diperkuat dengan pengembangan sistem tracking alumni yang dapat mengukur kemandirian dan keberlanjutan perubahan positif pada anak jalanan setelah tidak lagi aktif dalam program komunitas.
5. Pada fokus pemeliharaan, mengingat ditemukannya keterbatasan kolaborasi antar-stakeholder dengan lembaga pemerintah yang mengindikasikan gap komunikasi dan koordinasi, perlu dikembangkan sistem monitoring yang lebih menyeluruh untuk memantau perkembangan anak jalanan secara individual dan terstruktur. Klasifikasi program berdasarkan kelompok usia (kecil, sedang, besar) dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang disesuaikan perlu diimplementasikan untuk memastikan efektivitas program. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dengan lembaga pemerintah

seperti UPTD Kampung Anak Negeri dan DP3A-PPKB untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan meningkatkan sinergi program pemberdayaan. Mengingat adanya gap koordinasi yang signifikan antara Komunitas WEPOSE dengan lembaga pemerintah, perlu dibentuk forum koordinasi multi stakeholder yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pemberdayaan anak jalanan. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi, koordinasi program, dan pengembangan strategi bersama untuk menghindari duplikasi dan memaksimalkan dampak pemberdayaan.